



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI SULAWESI BARAT**

GEDUNG KEUANGAN NEGARA LANTAI 3 JALAN SOEKARNO HATTA MAMUJU SULAWESI BARAT 91511
TELEPON (0426) 2325034 FAKSIMILI (0426) 2325033 WEBSITE www.perbendaharaansulbar.org

Nomor : S-496 /WPB.26/BD.02/2018
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Penyampaian Kajian Fiskal Regional Triwulan I
Tahun 2018 Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Barat

14 Mei 2018

Yth. Direktur Jenderal Perbendaharaan
c.q. Direktur Pelaksanaan Anggaran
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta

Memenuhi Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-61/PB/2017 tanggal 4 Agustus 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Kajian Fiskal Regional, dengan ini disampaikan Kajian Fiskal Regional Triwulan I Tahun 2018 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat. Adapun *softcopy* laporan dalam bentuk file *pdf* telah disampaikan ke alamat [email ditpa@kemenkeu.go.id](mailto:ditpa@kemenkeu.go.id) dan ditembuskan (cc) ke lo.ditpa@gmail.com.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor,

Saiful Islam
NIP 19680420 198811 1 001



KAJIAN FISKAL REGIONAL



Proyek Rusun Madette Polman

**Triwulan I
2018**

Penyusun:

Penanggung jawab: Kakanwil DJPb Prov. Sulawesi Barat

Ketua Tim: Kabid PPA II **Editor & Grafis:** Budy Prastowo

Anggota: Arvis Ali Baso | Christmas Kurnianto | Mardiyana |

Hepy Yudha Hariyanto | Hasanuddin Jamal

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	v
BAB I PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL	1
1.1 Produk Domestik Regional Bruto	1
1.2 Inflasi	2
1.3 Indikator Kesejahteraan	2
BAB II PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN	4
2.1 Pendapatan Negara	4
2.1.1 Penerimaan Perpajakan	4
2.2 Belanja Negara	7
2.2.1 Belanja Pemerintah Pusat	7
2.2.2 Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)	7
2.2.3 Satuan Kerja yang Berpotensi Menjadi BLU	8
2.2.4 Manajemen Investasi Pusat.....	8
2.3 Prognosis Realisasi APBN	9
BAB III PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD	10
3.1 Pendapatan Daerah	11
3.1.1 Pendapatan Asli Daerah.....	11
3.1.2 Pendapatan Transfer	12
3.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	12
3.2 Belanja Daerah	13
3.2.1 Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal.....	13
3.2.2 Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Urusan	13
3.3 Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun 2018	14
BAB IV PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN	
KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)	15
4.1 LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN	15
4.2 PENDAPATAN KONSOLIDASIAN	15
4.2.1 Analisis Proporsi dan Perbandingan	15
4.2.2 Analisis Perubahan.....	16

4.2.3 Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan Konsolidasian	17
4.3 Belanja Konsolidasian.....	17
4.3.1 Analisis Proporsi dan Perbandingan	17
4.3.2 Analisis Perubahan.....	18
4.3.3 Analisis Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Indikator Ekonomi Regional	18
4.4 Analisis Kontribusi Pemerintah terhadap PDRB	19
BAB V BERITA/ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH.....	21
Dana Desa: Potensi dan Tantangan untuk Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah Tertinggal di Provinsi Sulawesi Barat.....	21
REFERENSI	26

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pagu dan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Sulawesi Barat.....	4
Tabel 2.2	Perkembangan Aset dan Realisasi PNBPN Satker yang Berpotensi menjadi BLU tahun 2016 - 2017.....	8
Tabel 2.3	Penyaluran KUR Berdasarkan Sektor Ekonomi Lingkup Provinsi Sulawesi Barat Triwulan I Tahun 2018.....	9
Tabel 2.4	Perkiraan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Sulawesi Barat s.d. Triwulan IV Tahun 2018 (dalam miliar Rp.)	9
Tabel 3.1	Realisasi APBD Lingkup Provinsi Sulawesi Barat.....	10
Tabel 3.2	Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Sulawesi Barat Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2018 (dalam Juta Rupiah)	14
Tabel 4.1	Perbandingan Pertumbuhan PDRB ADHK dengan Realisasi Pendapatan Konsolidasian Prov. Sulbar Triwulan I 2017-2018.....	17
Tabel 4.2	Kontribusi Belanja Operasional dan Belanja Modal Pemerintah Konsolidasian terhadap PDRB ADHB Prov. Sulawesi Barat Triwulan I 2018	19
Tabel 5.1	Rata-Rata Laju PDRB, Pendapatan per Kapita, dan IPM	21
Tabel 5.2	Rekapitulasi Waktu Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD Lingkup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2018*	24

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1-1	Pertumbuhan PDRB Prov. Sulbar per Triwulan Tahun 2017 dan 2018	1
Grafik 1-2	Komposisi PDRB ADHB Prov. Sulawesi Barat Sisi Produksi dan Pengeluaran Triwulan I Tahun 2018	1
Grafik 1-3	Inflasi Tahunan (YoY) dan Bulanan (<i>mtm</i>) Sulawesi Barat dan Nasional....	2
Grafik 2-1	Realisasi Penerimaan PPh per Kabupaten Lingkup Prov. Sulawesi Barat..	5
Grafik 2-2	Realisasi Penerimaan PPN per Kabupaten Lingkup Prov. Sulawesi Barat .	5
Grafik 2-3	Realisasi Penerimaan PPnBM per Kabupaten Lingkup Prov. Sulawesi Barat	6
Grafik 2-4	Realisasi Penerimaan PPnBM per Kabupaten Lingkup Prov. Sulawesi Barat Triwulan I 2018.....	6
Grafik 2-5	Tren Persentase Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Bantuan Sosial Lingkup Provinsi Sulawesi Barat Triwulan I Tahun 2018	7
Grafik 2-6	Tren Persentase Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa	7
Grafik 3-1	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Sulawesi Barat Triwulan I Tahun 2014-2018	11
Grafik 3-2	Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota.....	11
Grafik 3-3	Realisasi Pendapatan Transfer Lingkup Provinsi Sulawesi Barat	12
Grafik 3-4	Realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Lingkup Provinsi Sulawesi Barat Triwulan I Tahun 2014-2018.....	13
Grafik 3-5	Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal	13
Grafik 3-6	Pagu dan Realisasi Belanja Berdasarkan Urusan (Lima Urusan Tertinggi)	14
Grafik 4-1	Perbandingan Pendapatan Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap Pendapatan Konsolidasian Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017	15
Grafik 4-2	Perbandingan Realisasi Pendapatan Pemerintah Pusat dan Daerah	16
Grafik 4-3	Perubahan Komposisi Pendapatan Konsolidasian Sulbar TW I 2017-2018	16
Grafik 4-4	Perbandingan Belanja dan Transfer Pemerintah Pusat dan Daerah Terhadap Belanja dan Transfer Konsolidasian Sulawesi Barat Triwulan I 2018	17

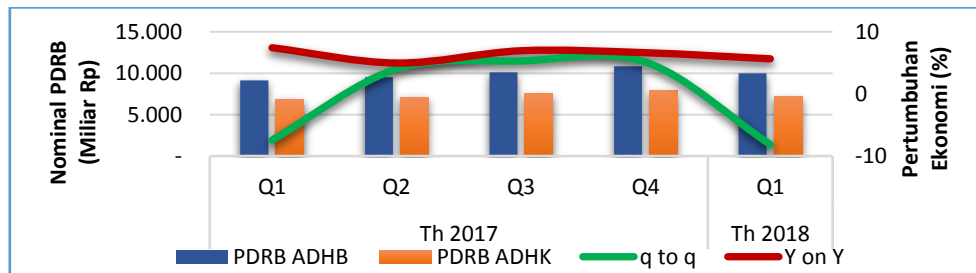
Grafik 4-5	Perubahan Komposisi Belanja dan Transfer Konsolidasian Prov. Sulbar	18
Grafik 4-6	Hubungan Belanja Pemerintah Konsolidasian, Laju PDRB, dan Inflasi Sulbar Triwulan I 2017 – Triwulan I 2018	19
Grafik 5-1	<i>Clustering</i> Wilayah Sulawesi Barat Menurut Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan per Kapita Berdasarkan Tipologi Klassen	22
Grafik 5-2	<i>Clustering</i> Wilayah Sulawesi Barat Menurut Laju Pertumbuhan Ekonomi dan IPM Berdasarkan Tipologi Klassen	22
Grafik 5-3	Perkembangan Realisasi Dana Desa dan Tingkat Kemiskinan Perdesaan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015-2017	23

BAB I PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL

1.1 Produk Domestik Regional Bruto

Pada periode Triwulan I tahun 2018, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Provinsi Sulawesi Barat adalah Rp9.991 miliar, tumbuh melambat sebesar 5,65 persen (yoy) dan berkontraksi hingga -8,15 persen dibandingkan Triwulan IV tahun 2017 (q to q). Laju pertumbuhan ekonomi tersebut diprediksi akan terdongkrak pada kuartal II dan III oleh beberapa *event* penting pada tahun ini, diantaranya pencairan THR dan Gaji ke-13, perayaan Idul Fitri, serta penyelenggaraan pilkada dan *ASEAN Games*, sehingga dapat mengejar target sesuai RPJMD Sulbar yang diharapkan melaju pada kisaran 7,1 - 7,4 persen (yoy). Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Sulbar berada di atas laju pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,06 persen (yoy).

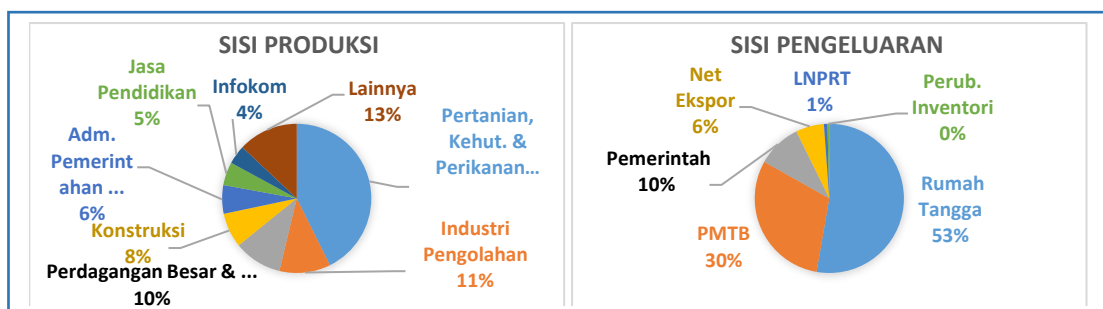
Grafik 1-1 Pertumbuhan PDRB Prov. Sulbar per Triwulan Tahun 2017 dan 2018



Sumber: BPS

Dari sisi Produksi, komposisi PDRB didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang berkontribusi hingga 43 persen, lalu disusul industri pengolahan dan perdagangan. Dibandingkan Triwulan I 2017, semua sektor produksi tumbuh positif. Sektor pertanian memberi andil terbesar terhadap pertumbuhan, yakni sebesar 1,48 persen (yoy) disebabkan musim panen raya. Sementara sektor industri pengolahan memberi andil terbesar kedua sebesar 1,24 persen (yoy) didorong oleh aktivitas pabrik pengolahan kelapa sawit di Kabupaten Pasangkayu yang saat ini tidak hanya mengolah hasil perkebunan lokal, namun juga dari luar daerah.

Grafik 1-2 Komposisi PDRB ADHB Prov. Sulawesi Barat Sisi Produksi dan Pengeluaran Triwulan I Tahun 2018



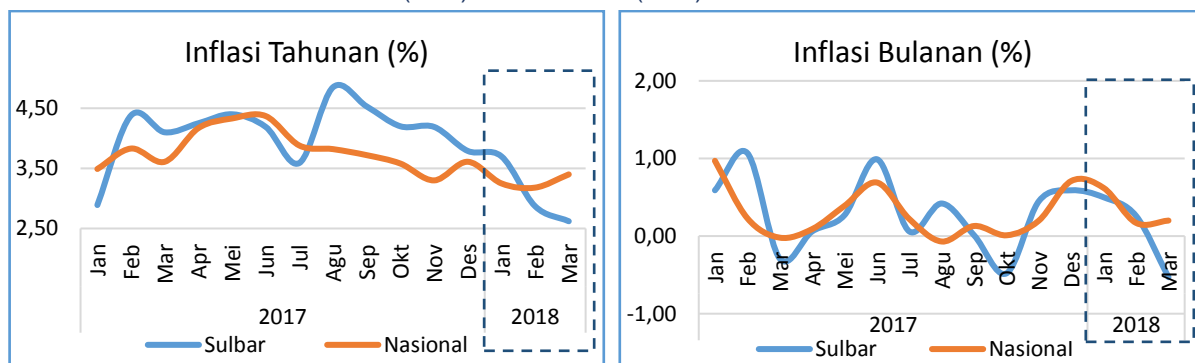
Sumber: BPS Sulbar (diolah)

Selanjutnya dari sisi Pengeluaran, konsumsi rumah tangga (PKRT) masih menjadi penopang terbesar PDRB Sulbar. Bila dilihat dari sumber pertumbuhan, PKRT masih merupakan pemegang andil terbesar dengan menyumbang pertumbuhan 3,49 persen (yoy), disusul PMTB. Pertumbuhan investasi Sulawesi Barat sebesar 5,25 persen (yoy) belum mampu menyamai pertumbuhan investasi nasional yang berada di atas 7 persen. Kondisi tersebut berkorelasi dengan pengeluaran pemerintah yang justru mengalami kontraksi akibat masih kecilnya realisasi penyerapan anggaran hingga akhir Maret 2018

1.2 Inflasi

Inflasi tahunan Mamuju sebagai representasi Sulawesi Barat pada Triwulan I 2018 menunjukkan tren penurunan dari 3,70 persen (yoy) di bulan Januari hingga tercatat 2,62 persen (yoy) di bulan Maret. Kondisi tersebut masih berada pada jalur yang ditargetkan dalam RPJMD Sulbar sebesar 3,23 persen (yoy) dan lebih kondusif dibandingkan dengan tren yang terjadi pada periode Triwulan I 2017, dimana tekanan inflasi tercatat di atas angka 4 persen (yoy). Berbeda dengan tren inflasi tahunan di Sulawesi Barat, selama periode triwulan I 2018, tren inflasi nasional justru menanjak pada kisaran 3,18 - 3,40 persen (yoy), namun masih terkendali sesuai asumsi APBN tahun 2018 sebesar 3,5 persen (yoy).

Grafik 1-3 Inflasi Tahunan (YoY) dan Bulanan (mtm) Sulawesi Barat dan Nasional



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat (diolah)

Fenomena inflasi pada bulan Januari-Februari didorong oleh kenaikan harga beras. Sementara pada bulan Maret, terjadi penurunan harga pada sub kelompok ikan segar. Musim panen raya yang terjadi sekitar bulan Maret juga menekan harga beras, sehingga memicu terjadinya deflasi yang cukup dalam, yakni sebesar minus 0,53 persen (mtm)

1.3 Indikator Kesejahteraan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Barat tahun 2017 yang dirilis oleh BPS Sulbar pada bulan April 2018 sebesar 64,30. Meskipun meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya, namun belum berhasil mencapai target yang ditetapkan

dalam RPJMD Provinsi Sulbar 2017-2022 yang pada tahun 2017 diharapkan mencapai 64,80. Masih dibutuhkan *effort* yang besar untuk mengejar ketertinggalan dari capaian nasional sebesar 70,81. Sementara itu, meskipun IPM Sulbar tumbuh menggembirakan 1,10 persen (*yoy*), namun masih dibutuhkan tingkat pertumbuhan yang lebih besar agar mampu mencapai target IPM Sulbar tahun 2018 sebesar 66,62.

Kondisi kemiskinan Sulawesi Barat periode September 2017 tidak lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Tingkat kemiskinan periode September 2017 tercatat sebesar 11,18 persen atau sebanyak 149,47 ribu jiwa, bertambah 2,57 ribu jiwa dibandingkan periode September 2016. Garis Kemiskinan menanjak sebesar 7,99 persen menjadi Rp315.918,- per kapita per bulan pada September 2017. Adapun komoditi yang memiliki pengaruh relatif besar terhadap Garis Kemiskinan tersebut di antaranya beras, rokok, perumahan, dan ikan tongkol/tuna/cakalang.

Memasuki periode kuartal I tahun 2018, seyogyanya kondisi kemiskinan Sulawesi Barat khususnya di daerah pedesaan terkoreksi menjadi lebih baik, menyusul perbaikan **Nilai Tukar Petani (NTP)** yang naik menembus angka 110,12. Capaian tersebut didorong oleh sektor Perkebunan Rakyat yang mencapai angka 118,89 dengan Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) pada bidang yang sama melejit hingga 134,78 dari angka 122,81 pada penghujung triwulan I tahun 2017 lalu.

Harapan akan membaiknya profil kemiskinan Sulbar juga muncul dari membaiknya **kondisi ketenagakerjaan** pada periode Februari 2018 yang tercatat sebesar 2,45 persen, berada dalam jalur target RPJMD Sulbar sebesar 2,96 persen. Capaian tersebut menempatkan Sulbar sebagai provinsi dengan tingkat pengangguran terendah kedua pada skala nasional. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) melonjak menjadi 71,53 persen setelah merosot cukup tajam pada periode Agustus 2017, menyebabkan jumlah pengangguran berkurang dari 19,7 ribu orang menjadi 16,3 ribu orang.

Ekspansi penyerapan tenaga kerja ditunjukkan oleh hampir semua sektor, dimana sektor pertanian menyerap paling banyak hingga 305,5 ribu pekerja. Namun perlu menjadi perhatian bahwa pekerja di Sulawesi Barat masih didominasi oleh pekerja berpendidikan SLTP ke bawah, yakni sebanyak 438,4 ribu orang atau sekitar 68 persen dengan status sebagai Pekerja Keluarga/Tidak Dibayar mencapai 144 ribu orang. Ke depan, kondisi ketenagakerjaan Sulawesi Barat diperkirakan semakin membaik seiring mulai beroperasinya PLTU Belang-Belang dan Mall Matos pada Triwulan II 2018. Situasi tersebut juga tercermin pada tingginya animo para pencari kerja dalam kegiatan *job fair* yang diselenggarakan pada awal Maret 2018.

BAB II PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN

Tabel 2.1 Pagu dan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Sulawesi Barat s.d. Akhir Triwulan I Tahun 2017 dan Tahun 2018 (dalam Miliar Rupiah)

Uraian	Tahun 2017			Tahun 2018		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
A. PENDAPATAN NEGARA	882,18	93,07	10,55%	769,92	84,86	11,02%
I. Penerimaan Dalam Negeri	882,18	93,07	10,55%	769,92	84,86	11,02%
1. Penerimaan Pajak	853,26	80,67	9,45%	745,26	70,47	9,46%
2. PNBPN	28,92	12,40	42,89%	24,65	14,39	58,37%
B. BELANJA NEGARA	9.747,80	2.070,65	21,24%	10.098,34	2.074,57	20,54%
I. Belanja Pemerintah Pusat	3.030,58	397,36	13,11%	3.477,90	379,66	10,92%
1. Belanja Pegawai	856,66	174,47	20,37%	996,17	178,49	17,92%
2. Belanja Barang	962,92	100,39	10,43%	1.394,30	133,46	9,57%
3. Belanja Modal	1.198,14	122,37	10,21%	1.079,67	67,38	6,24%
4. Belanja Bantuan Sosial	12,86	0,13	1,03%	7,75	0,33	4,26%
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	6.717,22	1.673,29	24,91%	6.620,44	1.694,92	25,60%
1. Transfer ke Daerah	6.256,13	1.673,29	26,75%	6.148,56	1.600,54	26,03%
a. Dana Perimbangan	6.089,96	1.590,20	26,11%	5.958,06	1.522,66	25,56%
1) Dana Alokasi Umum	4.192,85	1.399,30	33,37%	4.224,89	1.403,84	33,23%
2) Dana Bagi Hasil	218,15	36,47	16,72%	100,38	14,24	14,18%
3) Dana Alokasi Khusus	1.678,96	154,43	9,20%	1.632,79	104,59	6,41%
- DAK Fisik	981,39	0,00	0,00%	841,59	0,00	0,00%
- DAK Non Fisik	697,56	154,43	22,14%	791,20	104,59	13,22%
b. Dana Non Perimbangan	166,17	83,09	50,00%	190,50	77,88	40,88%
2. Dana Desa	461,09	0,00	0,00%	471,88	94,38	20,00%
C. SURPLUS/DEFSIT	-8.865,63	-1.977,57	22,31%	-9.328,42	-1.989,72	21,33%

Sumber: SPAN, Monev PA, SIMTRADA (diakses 30 April 2018); KPP Pratama Mamuju; KPP Pratama Majene

Pagu dan realisasi pendapatan Sulawesi Barat periode Triwulan I 2018 mengalami penurunan. Di lain sisi, pagu dan realisasi belanja mengalami kenaikan tipis dibandingkan periode yang sama tahun 2017. Hal tersebut menyebabkan defisit APBN melebar mencapai Rp1,98 triliun. Dari sisi pendapatan, realisasi penerimaan pajak turun sekitar Rp10 miliar menjadi sebesar Rp70,47 miliar, sedangkan realisasi PNBPN naik Rp2 miliar menjadi Rp14,39 miliar. Sementara dari sisi belanja, penurunan realisasi belanja pemerintah pusat menjadi Rp379,66 miliar diikuti oleh kenaikan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) menjadi Rp1.694,92 miliar, sehingga secara agregat realisasi belanja menanjak sekitar Rp21 miliar.

2.1 Pendapatan Negara

2.1.1 Penerimaan Perpajakan

Secara agregat, target penerimaan perpajakan Sulbar tahun 2018 berkurang sekitar Rp100 miliar (yoy). Sampai dengan akhir Maret 2018, realisasi penerimaan pajak sebesar Rp70,47 miliar atau baru mencapai 9,46 persen dari target tahunan. Sementara

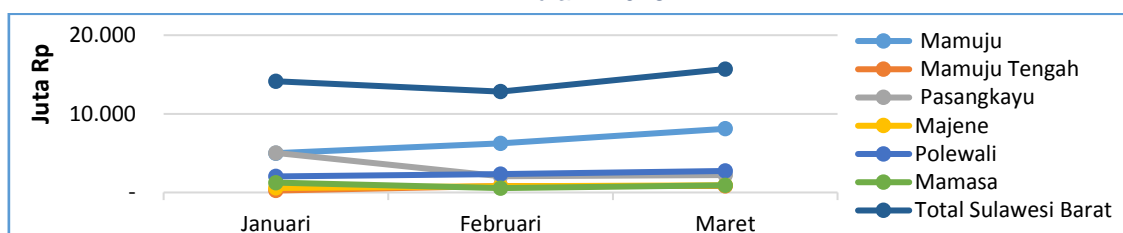
itu, realisasi penerimaan pajak mengalami kontraksi sekitar 12 persen (yoy). Penerimaan tersebut masih didominasi oleh penerimaan Pajak Penghasilan (PPh sebesar 60,54 persen) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN sebesar 34,21 persen).

Beberapa faktor yang menyebabkan masih rendahnya realisasi penerimaan perpajakan pada Triwulan I 2018, di antaranya adalah masih rendahnya penyerapan pagu belanja barang dan belanja modal, masih banyaknya rekanan yang merupakan Wajib Pajak di luar wilayah administrasi KPP Mamuju dan Majene, serta belum optimalnya pembayaran pajak atas pemanfaatan Dana Desa.

2.1.1.1 Pajak Penghasilan (PPh)

Jumlah penerimaan PPh Sulbar periode Triwulan I 2018 sebesar Rp42,66 miliar, menajak 2,64 persen (yoy) dan menjadi kontributor terbesar terhadap penerimaan pajak pemerintah pusat. Realisasi terbesar disumbang oleh Kabupaten Mamuju sebagai ibu kota provinsi, sedangkan realisasi terkecil pada Kabupaten Mamuju Tengah. Dilihat dari kondisi per bulan, realisasi PPh paling besar terjadi pada bulan Maret.

Grafik 2-1 Realisasi Penerimaan PPh per Kabupaten Lingkup Prov. Sulawesi Barat Triwulan I 2018

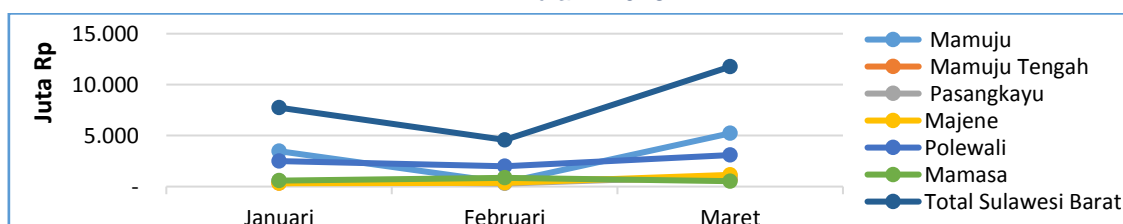


Sumber: KPP Pratama Mamuju, KPP Pratama Majene

2.1.1.2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Sejalan dengan PPh, realisasi PPN terbesar berasal dari Kabupaten Mamuju yang mencapai Rp9,08 miliar (37,67 persen dari total PPN). Angka tersebut mayoritas disumbang dari kegiatan belanja pemerintah. Tingginya realisasi penerimaan PPN di Kabupaten Mamuju dibandingkan kabupaten lainnya antara lain disebabkan oleh masih terkonsentrasinya pembangunan di ibukota provinsi tersebut.

Grafik 2-2 Realisasi Penerimaan PPN per Kabupaten Lingkup Prov. Sulawesi Barat Triwulan I 2018



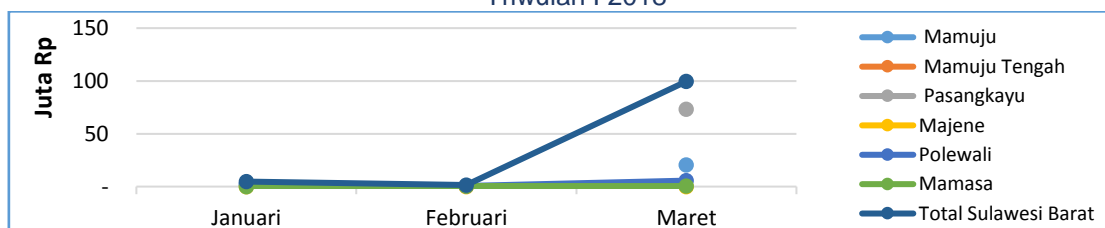
Sumber: KPP Pratama Mamuju, KPP Pratama Majene

Sementara itu, Kabupaten Polewali Mandar menjadi kontributor terbesar kedua terhadap realisasi penerimaan PPN Sulbar dengan menyumbang Rp7,59 miliar (31,52 persen). Jumlah penduduk yang lebih banyak dibandingkan kabupaten lain mendukung kegiatan transaksi perdagangan yang merupakan salah satu sektor penopang PDRB kabupaten Polewali Mandar. Tingginya transaksi pada sektor perdagangan tersebut mendorong realisasi penerimaan PPN.

2.1.1.3 Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Tren penerimaan PPnBM Sulbar mencapai puncaknya pada akhir Triwulan I 2018. Dibandingkan dengan realisasi pada PPh dan PPN, realisasi PPnBM relatif jauh lebih kecil, yakni hanya 0,15 persen dari total penerimaan pajak Sulbar. Kabupaten Pasangkayu menjadi kontributor terbesar pada jenis pajak ini dengan menyumbang Rp73 juta. Hal tersebut sejalan dengan NTUP yang paling tinggi terjadi pada sektor usaha perkebunan rakyat, yang mana usaha dimaksud paling luas terletak di kabupaten Pasangkayu. Perbaikan penghasilan masyarakat Pasangkayu tersebut memungkinkan nilai transaksi penjualan barang mewah menjadi lebih tinggi dibandingkan daerah lain.

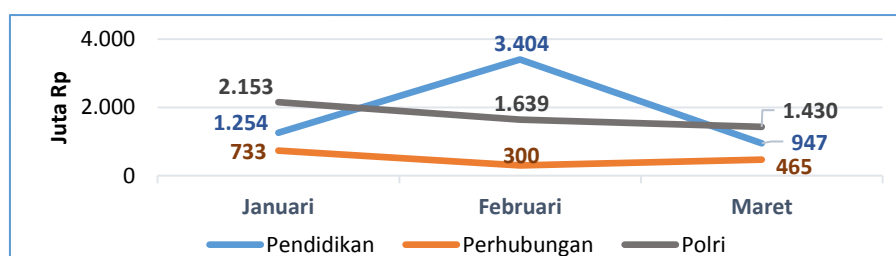
Grafik 2-3 Realisasi Penerimaan PPnBM per Kabupaten Lingkup Prov. Sulawesi Barat Triwulan I 2018



Sumber: KPP Pratama Mamuju, KPP Pratama Majene

2.1.1.4 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Grafik 2-4 Realisasi Penerimaan PPnBM per Kabupaten Lingkup Prov. Sulawesi Barat Triwulan I 2018



Sumber: SPAN (diakses 11 Mei 2018)

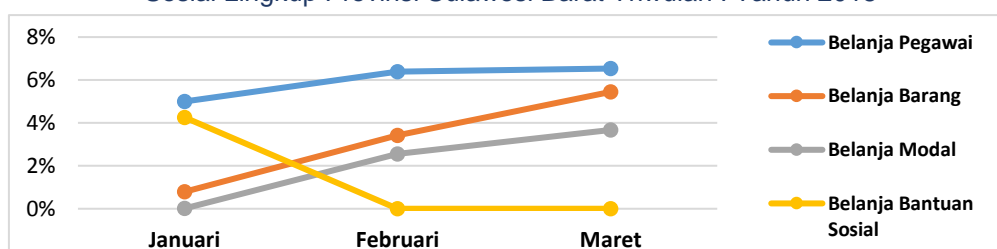
Sampai dengan akhir Maret 2018, realisasi PNBP Sulbar mencapai Rp14,39 miliar, meningkat sebesar 16 persen (yoy). Tiga penyumbang terbesar PNBP Sulbar berasal dari kelompok Pendapatan Jasa Layanan Kepolisian, Pendidikan, dan Perhubungan. PNBP Sulbar terealisasi paling besar pada Februari 2018 yang bersumber dari penerimaan jasa layanan pendidikan. Hal tersebut berkorelasi dengan masa

pembayaran biaya pendidikan untuk semester II. Sedangkan untuk pendapatan jasa kepolisian, dalam kurun waktu triwulan I 2018 menunjukkan tren penurunan. Realisasi terbesar pada Januari 2018 yang berasal dari pendapatan penerbitan dan pengesahan STNK. Adapun pendapatan dari jasa perhubungan menunjukkan tren lebih landai dengan realisasi paling banyak pada Januari 2018 yang berhubungan dengan tingginya penggunaan jasa transportasi terkait libur tahun baru.

2.2 Belanja Negara

2.2.1 Belanja Pemerintah Pusat

Grafik 2-5 Tren Persentase Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Bantuan Sosial Lingkup Provinsi Sulawesi Barat Triwulan I Tahun 2018

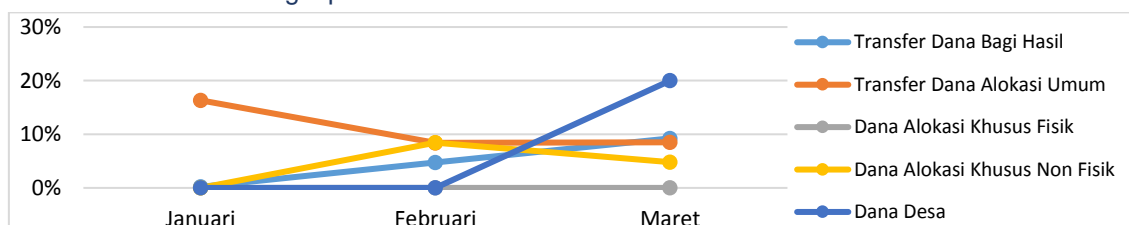


Sumber: OMSPAN, MONEV PA (diolah)

Sampai dengan Triwulan I 2018, Belanja Pemerintah Pusat terealisasi sebesar 20,54 persen atau tumbuh sebesar 0,19 persen (*yoy*). Belanja Modal menunjukkan akselerasi tertinggi sebesar Rp 39,49 miliar (*c-to-c*) sehubungan dengan rekonstruksi jalan nasional, pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman, serta pembangunan *seawall* di wilayah hilir sungai Kaluku dan Lariang. Sementara itu, Belanja Bantuan Sosial mengalami kontraksi setelah sebelumnya pada Januari 2018 terealisasi sebesar Rp330 juta untuk pelaksanaan program Bidik Misi PTKI pada satker STAIN Majene. Di lain sisi, realisasi Belanja Barang tumbuh sebesar 32,94 persen (*yoy*) didorong oleh pencairan dana BOS kepada siswa MI sebesar Rp16,75 miliar.

2.2.2 Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

Grafik 2-6 Tren Persentase Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Lingkup Provinsi Sulawesi Barat Triwulan I Tahun 2018



Sumber: OMSPAN, MONEV PA (diolah)

Realisasi Belanja TKDD di lingkup Provinsi Sulawesi Barat sampai dengan Triwulan I 2018 sebesar Rp1,69 triliun atau 25,69 persen dari pagu TKDD. Realisasi tersebut meningkat tipis 1,29 persen (*yoy*) didorong oleh laju realisasi DAU sebesar 0,32 persen

(yoy) yang terkonsentrasi pada Januari 2018. Sementara itu, Dana Desa tahap I yang seyogyanya dapat disalurkan pada Januari, baru terealisasi pada Maret 2018 sebesar Rp94,37 miliar. Hal tersebut terkorelasi dengan keterlambatan penyampaian APBDes yang perlu direvisi oleh aparatur desa guna mengakomodir program Padat Karya Tunai.

2.2.3 Satuan Kerja yang Berpotensi Menjadi BLU

Hingga saat ini, di wilayah Sulawesi Barat belum terdapat satker yang telah berstatus BLU Pusat. Akan tetapi, terdapat dua satker pengguna PNBPN yang secara substantif memiliki potensi untuk menjadi satker BLU Pusat yaitu Politeknik Kesehatan Mamuju dan Universitas Sulawesi Barat. Satker universitas Sulawesi Barat berpotensi untuk memenuhi persyaratan teknis menjadi satker BLU yang salah satunya diukur dari perkembangan nilai aset dan PNBPN. Demikian pula untuk Politeknik Kesehatan Mamuju yang pada Triwulan I 2018 mengalami peningkatan PNBPN sebesar Rp109 juta (yoy) seiring dengan tren kenaikan asetnya.

Tabel 2.2 Perkembangan Aset dan Realisasi PNBPN Satker yang Berpotensi menjadi BLU tahun 2016 - 2017

No	Nama Satker PNBPN	Aset			Realisasi PNBPN		
		Th 2016	Th 2017	Kenaikan	Th 2016	Th 2017	Kenaikan
1	Politeknik Kesehatan	47.268.115.129	72.208.371.343	52,76%	2.680.042.100	3.054.544.771	13,97%
2	Universitas Sulawesi Barat	98.013.967.730	103.736.902.465	5,84%	8.124.576.870	11.737.965.913	44,47%

Sumber: Monev PA (diakses 11 Mei 2018)

2.2.4 Manajemen Investasi Pusat

2.2.4.1 Penerusan Pinjaman

Sampai dengan kuartal I 2018, terdapat sekitar Rp10,14 miliar nilai pokok penerusan pinjaman kepada Pemerintah Daerah/BUMD yang ditatausahakan oleh Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Barat. Terdapat lima debitur penerusan pinjaman di wilayah Sulawesi Barat, yaitu PDAM Kab.Majene, Pemkab Mamuju, PDAM Kab.Polmas, Pemkab Polmas, dan PDAM Kab. Mamuju. Sampai dengan 31 Desember 2017, *Loan Agreement* dari kelima debitur telah berstatus lunas..

2.2.4.2 Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2018, nampak bahwa Sektor Perdagangan Besar dan Eceran masih mendominasi penyaluran KUR di Provinsi Sulawesi Barat dengan porsi 49,1 persen dari total penyaluran KUR. Minat debitur pada sektor tersebut melebihi minat debitur pada Sektor Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan yang meraup 37,63 persen dari pangsa penyaluran KUR. *Stakeholders* terkait perlu mempercepat inklusi keuangan calon debitur terhadap KUR sektor Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi mengingat sektor tersebut adalah kontributor terbesar PDRB Provinsi Sulawesi Barat.

Tabel 2.3 Penyaluran KUR Berdasarkan Sektor Ekonomi Lingkup Provinsi Sulawesi Barat Triwulan I Tahun 2018

No	Sektor Ekonomi	KUR			Rata-rata per Debitur (juta Rp)
		Akad (Juta Rp)	Outstanding (juta Rp)	Debitur	
1	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	91.172	38.573	2.187	41,94
2	Perikanan	2.422	25	95	25,49
3	Industri Pengolahan	8.993	1.027,75	337	26,68
4	Perdagangan Besar dan Eceran	118.951,60	16.073,78	4.771	24,93
5	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan	4.066,50	1.580	63	64,55
6	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	1.962	319	90	21,80
7	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa	1.071	-	18	59,50
8	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, dan Hiburan	13.102	764	523	25,05
	Total	242.280,10	58,36	8.084	

Sumber: SIKP (diolah)

2.3 Prognosis Realisasi APBN

Tabel 2.4 Perkiraan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Sulawesi Barat s.d. Triwulan IV Tahun 2018 (dalam miliar Rp.)

Uraian	Pagu	Realisasi s.d. Triwulan I		Perkiraan s.d. Triwulan IV	
		Rp.	% Realisasi Terhadap Pagu	Rp.	% Realisasi Terhadap Pagu
Pendapatan Negara	769,92	84,86	11,02%	682,31	88,62%
Belanja Negara	10.098,34	2.074,57	20,54%	9.781,63	96,86%
Surplus/Defisit	(9.328,42)	(1.989,72)		(9.099,32)	

Sumber: OMSPAN, MONEV PA (diolah)

Berdasarkan perhitungan analisis tren realisasi APBN menggunakan metode data pagu dan realisasi triwulanan APBN tahun 2015 – 2017 diproyesikan bahwa nilai realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Pusat pada akhir Triwulan IV Tahun 2018 akan mengalami peningkatan masing-masing sebesar 13,93 persen (yoy) dan 0,38 persen (yoy). Realisasi Belanja APBN berpotensi meningkat dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya masih berlangsungnya proyek rekonstruksi jalan nasional, pembangunan Mako Polda Sulbar, STAIN Majene, jaringan irigasi pertanian, dan peningkatan kapasitas bandar udara Tampa Padang. Sementara itu, peningkatan proyeksi pendapatan negara didorong oleh potensi penerimaan sektor perpajakan dimana pada tahun 2018 seluruh rekanan mitra pemerintah diwajibkan memiliki kode NPWP Provinsi Sulawesi Barat dan rasionalisasi target Pendapatan Negara Tahun 2018 yang terkoreksi sebesar 12,72 persen (yoy).

BAB III PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD

Tabel 3.1 Realisasi APBD Lingkup Provinsi Sulawesi Barat
s.d. Akhir Triwulan I Tahun 2017 dan Tahun 2018 (dalam Juta Rp)

Uraian	Tahun 2017		Tahun 2018	
	Pagu	Realisasi s.d. Tw I	Pagu	Realisasi s.d. Tw I
PENDAPATAN				
PAD	69.060	70.173	750.017	60.899
Pajak Daerah	317.838	48.319	359.877	49.480
Retribusi Daerah	93.137	10.838	101.146	5.839
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	21.893	-	28.006	-
Lain-Lain PAD yang Sah	236.191	11.015	260.989	5.581
Pendapatan Transfer	6.203.470	1.757.215	6.313.645	1.601.476
Dana Perimbangan	5.887.071	1.690.909	5.989.869	1.522.664
Dana Bagi Hasil	123.885	28.146	100.380	14.237
Dana Alokasi Umum	4.204.377	1.484.068	4.179.662	1.403.838
Dana Alokasi Khusus Fisik	837.106	-	841.590	-
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	721.704	178.695	868.238	104.590
Non Dana Perimbangan	170.898	58.408	189.944	77.875
Transfer Dana Lainnya	170.898	58.408	189.944	77.875
Transfer Pemerintah Daerah	145.500	7.898	133.831	937
Bagi Hasil Pajak	123.800	7.898	129.668	937
Transfer Lainnya	21.700	-	4.163	-
Dana Desa	461.095	-	472.772	94.376
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	14.654	1.474	58.796	9
Pendapatan Hibah	11.270	1.253	13.200	-
Pendapatan Lainnya	3.384	222	45.596	9
JUMLAH PENDAPATAN	7.348.279	1.828.862	7.595.230	1.756.760
BELANJA	6.902.240	704.035	6.926.910	645.225
Belanja Pegawai	2.580.715	378.688	2.680.689	453.678
Belanja Barang	1.683.493	99.024	1.918.795	83.312
Belanja Bunga	8.959	2.063	28.333	4.430
Belanja Hibah	414.538	106.794	393.162	63.046
Belanja Bantuan Sosial	100.875	12.368	31.530	7.203
Belanja Modal	2.103.700	105.074	1.861.851	33.525
Belanja Tidak Terduga	9.960	23	12.550	30
TRANSFER PEMERINTAH DAERAH	885.808	24.654	931.069	53.037
Transfer Dana Desa	461.095	-	472.268	23.330
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemda/Desa	290.949	12.825	265.458	29.708
Transfer Bagi Hasil Pajak	128.954	11.829	147.764	-
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	4.810	-	45.579	-
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	7.788.048	728.689	7.857.979	698.262
SURPLUS/DEFISIT	(439.769)	1.100.172	(262.749)	1.058.498

Sumber: BPKAD, Kanwil DJPB Prov. Sulbar (data diolah)

Target pendapatan daerah Sulawesi Barat tahun 2018 naik Rp246,9 miliar atau 3,36% (yoy). Secara kumulatif target PAD naik hingga sebesar Rp80,9 miliar atau 12,10% (yoy). Sementara itu, Pendapatan Transfer naik sebesar Rp110,1 miliar atau 1,78% (yoy), Dana Desa meningkat sejumlah Rp11,6 miliar atau 2,53% (yoy), dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tumbuh signifikan sebesar Rp44,1 miliar atau 301,22% (yoy).

Di sisi yang lain, pagu anggaran belanja daerah Sulawesi Barat tahun 2018 tumbuh Rp24,6 miliar atau 0,36% (yoy) didorong oleh pertumbuhan pagu Belanja Pegawai sebesar 3,87% (yoy) dan pagu Belanja Barang yang meningkat sebesar Rp235,3 miliar atau 13,98% (yoy). Sementara itu, pagu Belanja Modal dan pagu belanja

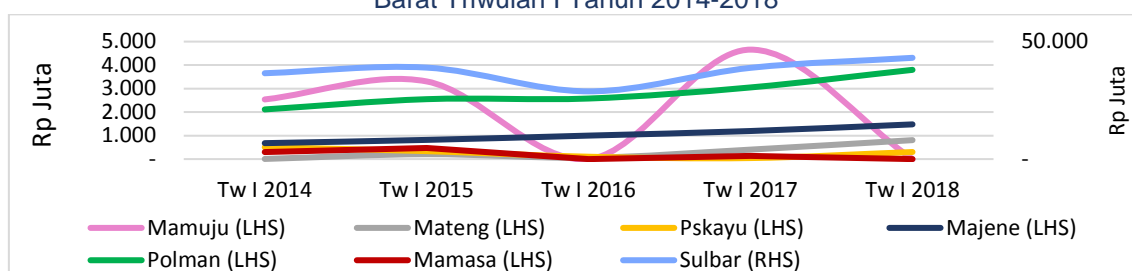
lainnya terkontraksi masing-masing sebesar 11,50% (yoy) dan 12,87% (yoy). Lebih lanjut, pagu Transfer Pemerintah Daerah tumbuh sebesar 5,11% (yoy). Defisit diperkirakan menurun sekitar Rp173,3 miliar atau 39,41%. Sumber pembiayaan utama dalam menutup defisit berasal dari SiLPA TAYL Rp196 miliar dan dari penerimaan pinjaman daerah daerah dan penerimaan piutang daerah masing-masing sebesar Rp79,5 miliar dan Rp56,7 miliar.

3.1 Pendapatan Daerah

3.1.1 Pendapatan Asli Daerah

3.1.1.1 Penerimaan Pajak Daerah

Grafik 3-1 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Sulawesi Barat Triwulan I Tahun 2014-2018

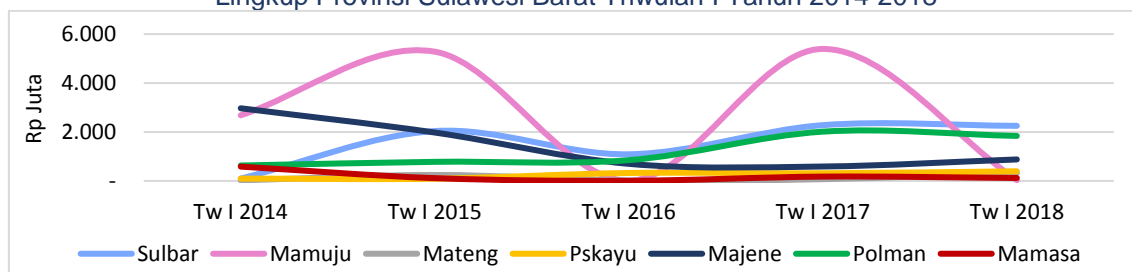


Sumber: BPKAD, Kanwil DJPB Prov. Sulbar (data diolah)

Realisasi pajak daerah triwulan I tahun 2018 tumbuh sebesar 2,40% (yoy) didorong oleh peningkatan realisasi penerimaan pajak daerah di sebagian besar pemda di Sulawesi Barat. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak daerah sebesar Rp43,1 miliar atau 87,10% dari total realisasi pajak daerah. Jenis pajak daerah yang memberikan andil yang cukup besar adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dengan realisasi sebesar 22,59% dan 20,02% dari total pendapatan pajak daerah.

3.1.1.2 Penerimaan Retribusi Daerah

Grafik 3-2 Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Sulawesi Barat Triwulan I Tahun 2014-2018



Sumber: BPKPD, BPKAD, DPKAD (diolah)

Realisasi retribusi daerah Triwulan I 2018 turun Rp4,9 miliar atau 46,13% (yoy) dipicu oleh menurunnya realisasi penerimaan retribusi daerah di sebagian besar pemda di Sulawesi Barat. Pemerintah Kabupaten Mamuju sebagai kontributor terbesar pada periode yang sama tahun sebelumnya tidak mampu mempertahankan kinerjanya pada

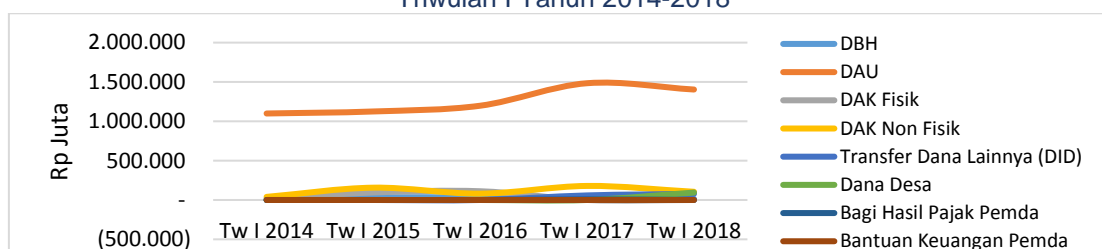
Triwulan I tahun 2018, dimana realisasinya turun drastis hingga 99,42%. Hal tersebut diduga berkorelasi dengan keterlambatan realisasi klaim pelayanan kesehatan rumah sakit kepada BPJS.

3.1.1.3 Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Aktivitas yang sama terjadi dengan triwulan I tahun-tahun sebelumnya, dimana pembagian laba atas penyertaan modal pemda pada PMD/BUMD belum terealisasi kepada seluruh pemda di Sulawesi Barat. Diperkirakan pembagian laba PMD/BUMD akan terealisasi pada triwulan II tahun 2018 yang secara kumulatif mencapai 80% atau sebesar Rp22,4 miliar dari target penerimaan.

3.1.2 Pendapatan Transfer

Grafik 3-3 Realisasi Pendapatan Transfer Lingkup Provinsi Sulawesi Barat
Triwulan I Tahun 2014-2018



Sumber: BPKPD, BPKAD, DPKAD (diolah)

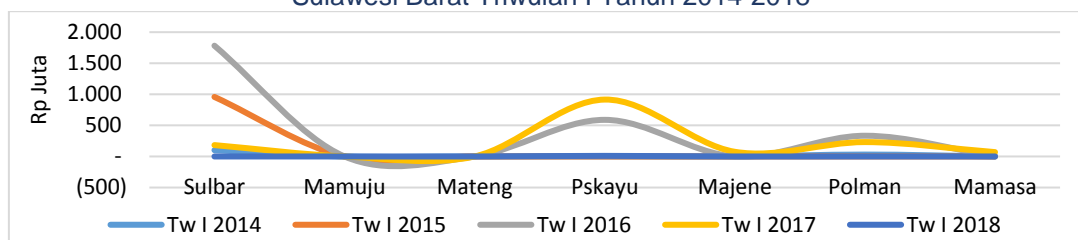
Realisasi Pendapatan Transfer triwulan I tahun 2018 turun Rp61,3 miliar atau 3,49 (yoy). Jenis transfer ke daerah yang mengalami penurunan adalah DAU yang realisasinya terkontraksi sebesar 5,41% (yoy). Realisasi DBH dan DAK Non Fisik turut terkontraksi masing-masing sebesar 49,42% (yoy) dan 41,47% (yoy). Lebih lanjut, realisasi DID mengalami akselerasi sebesar Rp19,4 miliar atau 33,33% (yoy).

Di sisi lain, realisasi DAK Fisik tahap I tahun 2018 masih nihil karena pemda masih belum melengkapi dan menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran DAK kepada KPPN. Dana Desa tahap I dalam rangka program padat karya tunai (*Cash For Work*) tuntas disalurkan sebesar Rp94,3 miliar ke seluruh RKUD pemkab di Sulawesi Barat dan dari nilai tersebut baru 24,72% yang tersalurkan ke RKD. Transfer pemerintah daerah dalam rangka bagi hasil pajak daerah mengalami penurunan sebesar 88,14% (yoy).

3.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah turun drastis sebesar Rp1,4 miliar atau 99,37% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal tersebut terjadi karena penerimaan hibah realisasinya masih nihil dan turunnya realisasi penerimaan lain-lain sebesar Rp213 juta atau 95,84%

Grafik 3-4 Realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Lingkup Provinsi Sulawesi Barat Triwulan I Tahun 2014-2018

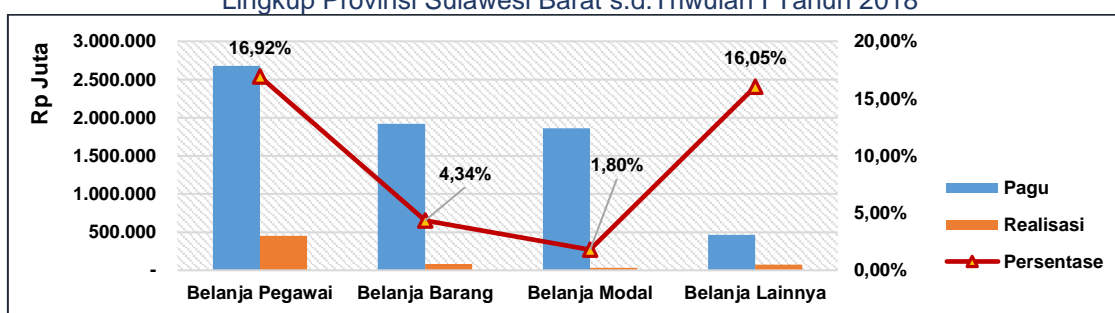


Sumber: BPKPD, BPKAD, DPKAD (diolah)

3.2 Belanja Daerah

3.2.1 Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal

Grafik 3-5 Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal Lingkup Provinsi Sulawesi Barat s.d.Triwulan I Tahun 2018



Sumber: BPKPD, BPKAD, DPKAD (diolah)

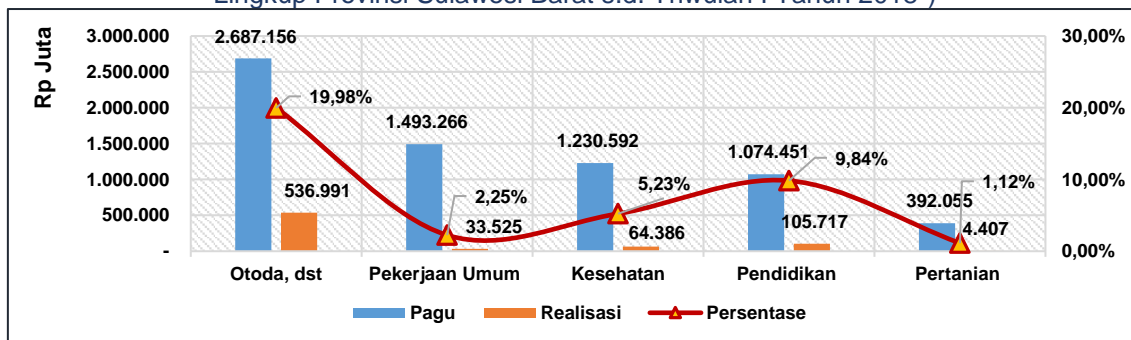
Realisasi belanja daerah Sulawesi Barat sampai dengan triwulan I tahun 2018 mencapai Rp645,2 miliar atau 9,31% dari total alokasi pagu. Realisasi tersebut mengalami kontraksi sebesar 8,35% (yoy). Seluruh komponen belanja seperti belanja barang/jasa, belanja modal dan belanja lainnya mengalami penurunan. Di lain sisi, belanja pegawai mengalami peningkatan signifikan sebesar 19,80% (yoy) karena adanya peningkatan belanja pada unsur gaji, tunjangan, dan biaya pemungutan pajak daerah bagi PNSD/Kepala Daerah/Pimpinan/Anggota DPRD. Di sisi lainnya, merosotnya realisasi belanja modal hingga Rp71,5 miliar atau 68,09% (yoy) diduga berkorelasi dengan lambatnya proses penyelesaian lelang pengadaan barang dan jasa di pemda. Sementara itu, penurunan realisasi belanja barang/jasa sebesar 15,87% (yoy) diduga berhubungan dengan lambatnya penyerapan Belanja Barang Dana BOS dan Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat. Realisasi Belanja Lainnya turut berkontraksi 38,38% (yoy) seiring rendahnya realisasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial.

3.2.2 Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Urusan

Realisasi belanja urusan Otda, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian mencatat realisasi tertinggi sebesar 19,98% dari total realisasi didorong oleh realisasi Belanja Pegawai serta realisasi belanja barang/jasa operasional perkantoran. Sedangkan realisasi pada

belanja urusan Pendidikan mencapai 9,84% didorong oleh realisasi pembayaran tunjangan tambahan penghasilan dan tunjangan profesi guru serta realisasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Grafik 3-6 Pagu dan Realisasi Belanja Berdasarkan Urusan (Lima Urusan Tertinggi) Lingkup Provinsi Sulawesi Barat s.d. Triwulan I Tahun 2018*)



Sumber: BPKPD, BPKAD, DPKAD (diolah); Keterangan: *) Angka Sangat Sementara

Realisasi belanja urusan Kesehatan tercatat sebesar 5,23% dari total realisasi didominasi oleh realisasi Belanja Barang keperluan RSUD dan realisasi dana Bantuan Operasional Kesehatan. Sementara itu, realisasi belanja urusan Pekerjaan Umum mencapai 2,25% yang didorong oleh realisasi belanja modal peralatan dan mesin, serta jasa konsultan perencanaan untuk pembangunan/rehabilitasi gedung dan bangunan serta jalan, irigasi dan jaringan. Realisasi belanja urusan Pertanian mencapai 1,12% yang didorong oleh realisasi pengadaan bahan/bibit tanaman dan peternakan.

3.3 Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun 2018

Tabel 3.2 Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Sulawesi Barat Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2018 (dalam Juta Rupiah)

Uraian	Pagu	Realisasi		Perkiraan Realisasi	
		s.d.Triwulan I		s.d.Triwulan IV	
		Rp	% Realisasi Terhadap Pagu	Rp	% Perkiraan Realisasi Terhadap Pagu
Pendapatan Daerah	7.595.230	1.756.760	23,13%	7.369.452	97,03%
Belanja Daerah	7.857.979	698.262	8,89%	7.315.630	93,10%
Surplus/Defisit	(262.749)	1.058.498		53.823	

Sumber: BPKPD, BPKAD, DPKAD, Kanwil DJPB Prov. Sulbar (diolah)

Dari hasil prognosis menggunakan analisis tren, realisasi APBD sampai dengan akhir tahun 2018 diproyeksikan mencapai 97,03% atau tumbuh naik 1,03% (yoy) sebagai dampak dari optimisme pemda terhadap penerimaan transfer 2018 terutama penyaluran DAK Fisik. Sedangkan realisasi belanja diproyeksikan mencapai 93,10% atau tumbuh 0,69% (yoy) yang berkorelasi dengan peningkatan pagu belanja pegawai dan belanj barang/jasa yang cukup signifikan. Sementara itu, APBD Provinsi Sulawesi Barat diperkirakan akan mengalami surplus sebesar 44,11% sebagai dampak kebijakan efisiensi belanja yang akan terus bergulir sampai dengan akhir tahun 2018.

BAB IV PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)

4.1 LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN

Tabel 4.1. Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian
Tingkat Wilayah Provinsi Sulawesi Barat s.d. Triwulan I Tahun 2018 (dalam Miliar Rp.)

Uraian	2018				2017
	Pusat	Daerah	Konsolidasi *	Kenaikan	Konsolidasi
Pendapatan Negara	1.779.348,75	1.112.493,59	1.196.927,32	-22,75%	1.549.482,81
Pendapatan Perpajakan	70.044,57	49.479,70	119.524,27	-1,04%	120.777,45
Pendapatan Bukan Pajak	14.389,17	9.828,26	24.217,42	-41,41%	41.330,63
Hibah	0,00	0,00	0,00	-100,00%	1.252,60
Transfer*	1.694.915,01	1.053.185,63	1.053.185,63	-24,02%	1.386.122,13
Belanja Negara	2.074.442,92	628.654,47	1.008.182,38	-40,39%	1.691.348,32
Belanja Pemerintah	379.527,91	584.605,15	964.133,05	-42,56%	1.678.522,96
Transfer*	1.694.915,01	44.049,32	44.049,32	243,45%	12.825,36
Surplus/(Defisit)	-295.094,17	483.839,12	188.744,95	-233,04%	-141.865,51
Pembiayaan	0,00	-1.999,30	-1.999,30	-108,79%	22.740,06
Penerimaan Pembiayaan Daerah	0,00	0,70	0,70	-100,00%	31.740,06
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	2.000,00	2.000,00	-77,78%	9.000,00
Sisa Lebih/(Kurang)					
Pembiayaan Anggaran	-295.094,17	481.839,82	186.745,65	-256,76%	-119.125,45

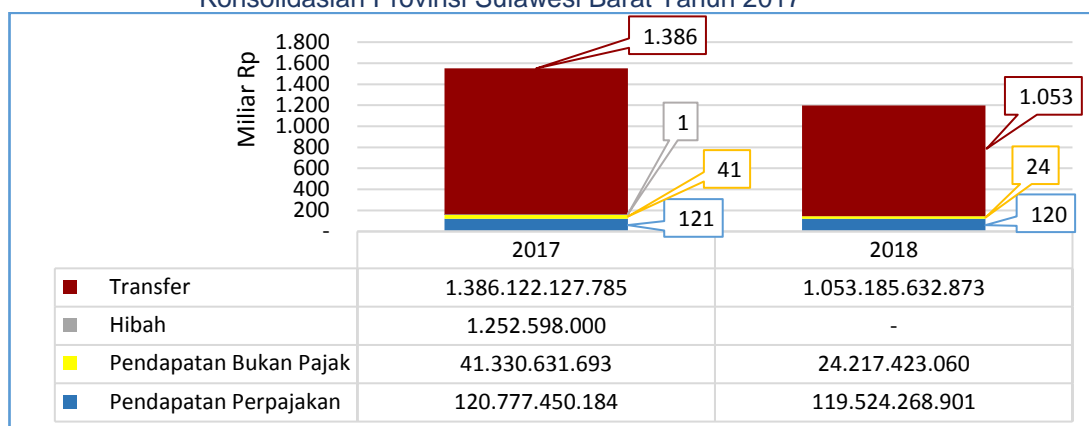
Sumber: LKPK Tingkat Wilayah Kanwil DJPb Prov. Sulbar periode TW.I Tahun 2018 dan 2017

Cat: *Seluruh Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dieliminasi dengan Belanja Transfer Pemerintah Pusat, sehingga menghasilkan angka konsolidasian senilai Pendapatan dan Belanja Transfer Daerah.

4.2 PENDAPATAN KONSOLIDASIAN

4.2.1 Analisis Proporsi dan Perbandingan

Grafik 4-1 Perbandingan Pendapatan Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap Pendapatan Konsolidasian Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017

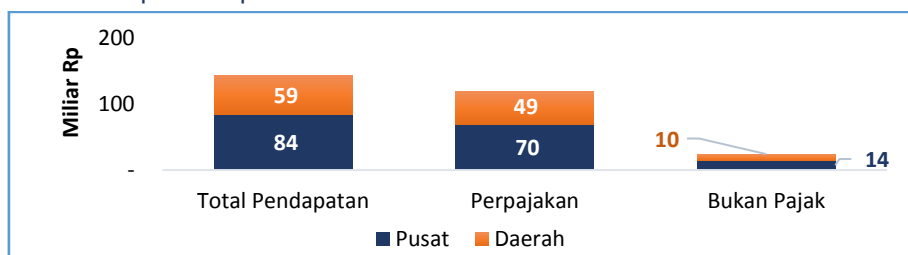


Sumber: LKPK Kanwil DJPb Prov. Sulbar (diolah)

Performa realisasi pendapatan konsolidasian di Prov. Sulbar s.d. Triwulan I Tahun 2018 turun hingga 22,75 persen (yoy) menjadi sebesar Rp1.197 miliar. Realisasi Pendapatan Konsolidasian Sulbar secara signifikan didominasi oleh pendapatan transfer yang seluruhnya berasal dari pendapatan pemerintah daerah. Jika

dibandingkan dengan total pendapatan pada masing-masing tahun, proporsi pendapatan transfer Triwulan I 2018 mengalami penyempitan sekitar dua persen (yoy). Sementara secara nominal, pendapatan transfer konsolidasian merosot hingga 24 persen dari Rp1.386 miliar menjadi Rp1.053 miliar. Transfer DBH Pajak kembali turun setelah mengalami kenaikan signifikan akibat dari kebijakan *Tax Amnesty* yang diberlakukan hingga akhir Triwulan I 2017.

Grafik 4-2 Perbandingan Realisasi Pendapatan Pemerintah Pusat dan Daerah Terhadap Pendapatan Konsolidasian Sulbar s.d. Triwulan I Tahun 2018



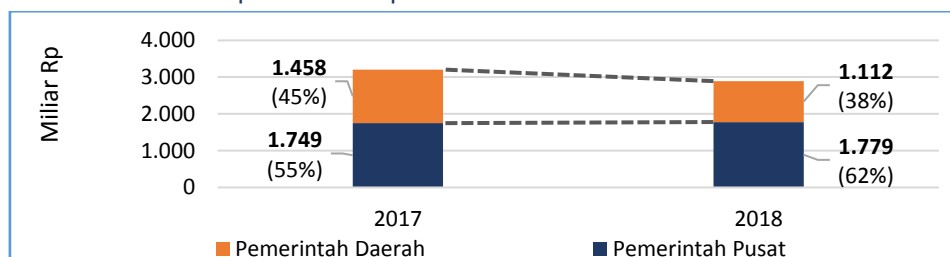
Sumber: LKPK Kanwil DJPb Prov. Sulbar (diolah)

Di luar pendapatan transfer, pendapatan konsolidasian yang bersumber dari perpajakan dan bukan pajak masih didominasi oleh pendapatan pemerintah pusat. Realisasi pendapatan perpajakan pemerintah pusat terbesar berasal dari PPN Dalam Negeri (Rp24 miliar) dan PPh 21 (Rp18,9 miliar), sedangkan penopang terbesar pendapatan perpajakan pemerintah daerah bersumber dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Rp16 miliar) serta Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Rp13,8 miliar). Sementara itu, realisasi pendapatan Bukan Pajak pemerintah pusat paling banyak berasal dari Pendapatan Biaya Pendidikan (Rp5,5 miliar), sedangkan retribusi pelayanan kesehatan menjadi kontributor terbesar (Rp4,3 miliar) terhadap pendapatan Bukan Pajak pemerintah daerah.

4.2.2 Analisis Perubahan

Kontribusi pemerintah daerah Sulbar terhadap total realisasi pendapatan Triwulan I 2018 mereduksi seiring berkurangnya pendapatan agregat. Tingkat ketergantungan Sulbar terhadap pemerintah pusat yang semakin tinggi terlihat dari melebarnya kontribusi pendapatan pemerintah pusat.

Grafik 4-3 Perubahan Komposisi Pendapatan Konsolidasian Sulbar TW I 2017-2018



Sumber: LKPK Kanwil DJPb Prov. Sulbar (diolah)

4.2.3 Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan Konsolidasian

Sampai dengan Triwulan I 2018, PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) di Prov. Sulbar sebesar Rp7,24 triliun atau tumbuh melambat 5,65 persen (YoY). Pada saat yang sama, jumlah realisasi pendapatan pajak dan bukan pajak berkontraksi -11,33 persen.

Tabel 4.1 Perbandingan Pertumbuhan PDRB ADHK dengan Realisasi Pendapatan Konsolidasian Prov. Sulbar Triwulan I 2017-2018

Uraian	Q1-2017		Q1-2018	
	Realisasi	Kenaikan (YoY)	Realisasi	Kenaikan (YoY)
Penerimaan Perpajakan	121	16,87%	120	-1,04%
PNBP	41	8,72%	24	-41,41%
Total	162	14,67%	144	-11,33%
PDRB ADHK/Pert.Ekonomi	6.853	7,43%	7.240	5,65%

Sumber: LKPK Kanwil DJPb Prov. Sulbar (diolah)

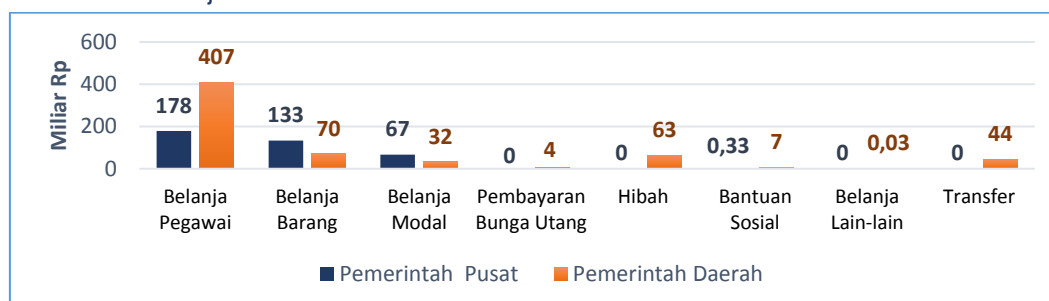
Kenaikan total pendapatan konsolidasian Sulbar pada periode Triwulan I 2017 lebih dipengaruhi oleh kebijakan *tax amnesty* yang telah berhasil mengungkit pendapatan perpajakan. Sedangkan pada periode Triwulan I 2018, pertumbuhan PDRB tidak dapat diimbangi oleh pertumbuhan realisasi pendapatan yang justru tereduksi. Pemerintah Sulbar perlu menaruh perhatian lebih pada potensi PNBP (baik pendapatan pemerintah pusat maupun daerah) agar dapat mengulang capaian Triwulan I 2017.

4.3 Belanja Konsolidasian

4.3.1 Analisis Proporsi dan Perbandingan

Secara agregat, jumlah belanja dan transfer konsolidasian Sulbar pada kuartal I 2018 sebesar Rp1.008 miliar. Dari jumlah tersebut, 38 persen di antaranya bersumber dari dana APBN, sedangkan 62 persen berasal dari dana APBD.

Grafik 4-4 Perbandingan Belanja dan Transfer Pemerintah Pusat dan Daerah Terhadap Belanja dan Transfer Konsolidasian Sulawesi Barat Triwulan I 2018



Sumber: LKPK Kanwil DJPb Prov. Sulbar (diolah)

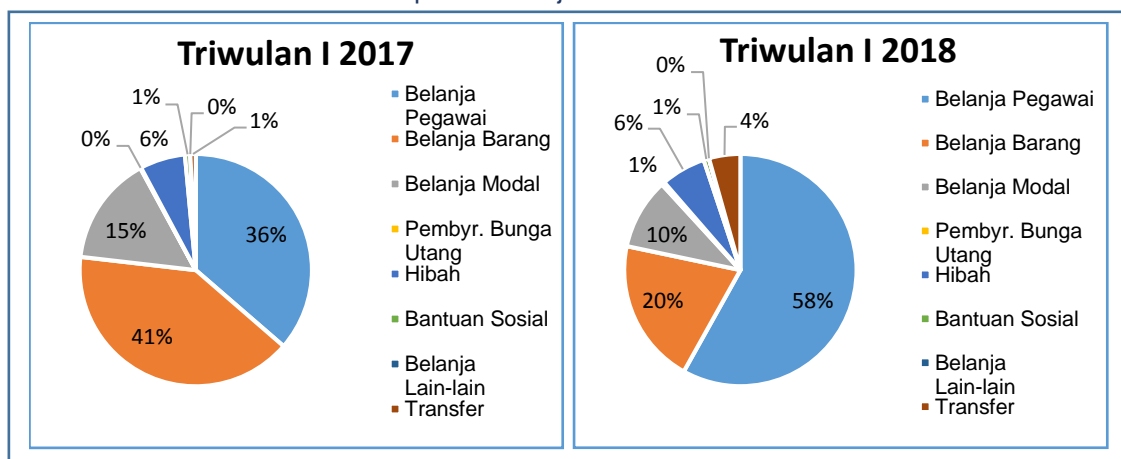
Porsi belanja pemerintah daerah pada belanja pegawai lebih dari dua kali lipat dibandingkan belanja pemerintah pusat, berkorelasi dengan jumlah pegawai. Aktivitas

pemerintah pada kuartal I 2018 masih belum optimal, terlihat dari realisasi belanja barang dan belanja modal yang masih relatif kecil, dengan dominasi belanja pemerintah pusat. Masih rendahnya realisasi belanja modal pemerintah daerah berhubungan dengan proses lelang yang belum optimal pada awal tahun anggaran, serta belum dimulainya pencairan DAK Fisik hingga akhir Maret 2018.

4.3.2 Analisis Perubahan

Dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017, jumlah realisasi belanja dan transfer konsolidasian Sulbar pada kuartal I 2018 merosot 40 persen dari Rp1.691 miliar menjadi Rp1.008 miliar. Jika dicermati per jenisnya, penurunan signifikan tersebut tidak terdistribusi secara merata, hanya terjadi pada beberapa jenis belanja seperti belanja barang dan belanja modal. Hal tersebut berimbas pada perubahan komposisi belanja sebagaimana terlihat dalam grafik berikut.

Grafik 4-5 Perubahan Komposisi Belanja dan Transfer Konsolidasian Prov. Sulbar



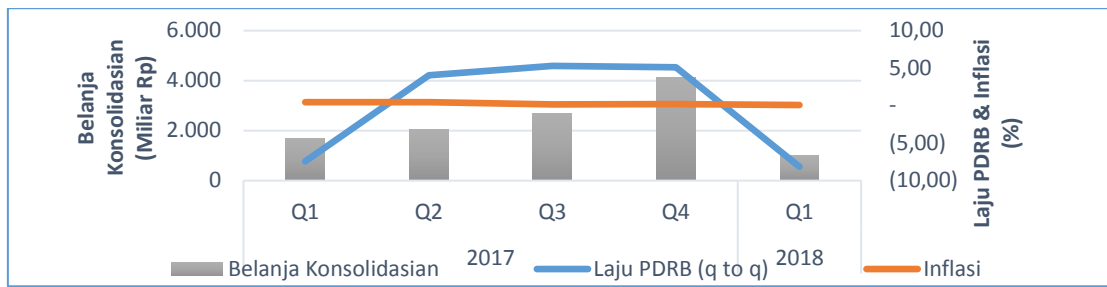
Sumber: LKPK Kanwil DJPb Prov. Sulbar (diolah)

Meskipun jumlah realisasi belanja pegawai berkurang Rp29 miliar, secara proporsi dominasi belanja pegawai melebar seiring dengan berkurangnya realisasi belanja barang dan belanja modal. Hal tersebut disebabkan pengurangan belanja pegawai jauh lebih kecil dibandingkan pengurangan belanja barang dan modal yang masing-masing menurun sebesar Rp481 miliar dan Rp158 miliar.

4.3.3 Analisis Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Indikator Ekonomi Regional

Untuk mengukur dampak kebijakan fiskal terhadap indikator ekonomi regional dapat digunakan grafik perkembangan indikator yang relevan guna membandingkan linearitas antar indikator. Pengujian ini menggunakan indikator jumlah belanja pemerintah konsolidasian per triwulan, laju pertumbuhan PDRB (q to q), dan inflasi (rata-rata inflasi bulanan setiap triwulan).

Grafik 4-6 Hubungan Belanja Pemerintah Konsolidasian, Laju PDRB, dan Inflasi Sulbar Triwulan I 2017 – Triwulan I 2018



Sumber: LKPK Kanwil DJPb Prov. Sulbar

Hasil pengujian linearitas sebagaimana dalam dalam grafik menunjukkan bahwa belanja konsolidasian memiliki hubungan yang linear dengan pertumbuhan PDRB. Adapun perlambatan pertumbuhan PDRB pada triwulan IV 2017 dibandingkan triwulan III 2017 lebih disebabkan oleh perlambatan pada beberapa lapangan usaha yang pada triwulan III 2017 mengalami percepatan pertumbuhan yang cukup signifikan. Sementara di sisi lain, dalam kurun waktu Triwulan I 2017 hingga Triwulan I 2018, belanja pemerintah konsolidasian Sulbar tampak tidak linear dengan inflasi. Kondisi tersebut berhubungan dengan inflasi Sulbar yang lebih dipengaruhi oleh kelompok *volatile foods*.

Selain indikator di atas, dampak kebijakan fiskal juga dapat dicermati dari perubahan jumlah belanja pemerintah pada urusan tertentu dibandingkan dengan indikator kesejahteraan, salah satunya indikator Nilai Tukar Petani (NTP). Pertanian merupakan kontributor terbesar terhadap PDRB Sulbar dan sekaligus merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Oleh karena itu, indikator NTP dapat menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat Sulbar. Hasil perbandingan data menunjukkan bahwa peningkatan belanja sektor pertanian sebesar 11,82 persen (yoy) dari Rp18,37 miliar menjadi Rp20,54 miliar pada kuartal I 2018 berkorelasi dengan kenaikan NTP sebesar 4,68 basis poin dari 105,44 (Triwulan I 2017) menjadi 110,12 (Triwulan I 2018).

4.4 Analisis Kontribusi Pemerintah terhadap PDRB

Tabel 4.2 Kontribusi Belanja Operasional dan Belanja Modal Pemerintah Konsolidasian terhadap PDRB ADHB Prov. Sulawesi Barat Triwulan I 2018

Uraian	Jumlah (Rp)	Kontribusi terhadap PDRB ADHB
Belanja Operasional Pemerintah	908.543.202.686	9,09%
Belanja Modal Pemerintah	99.639.172.712	1,00%
PDRB ADHB	9.991.000.000.000	

Sumber: LKPK Kanwil DJPb Prov. Sulbar; BPS (diolah)

Kontribusi belanja pemerintah yang dihitung dari perbandingan antara belanja operasional pemerintah dengan nilai PDRB ADHB Sulbar adalah sebesar 9,09 persen.

Sedangkan investasi pemerintah yang tercermin dari belanja modal pemerintah berkontribusi sebesar satu persen terhadap PDRB ADHB Sulbar. Memperhatikan laju perekonomian Sulbar yang pada kuartal I 2018 melambat dari 7,43 persen menjadi 5,65 persen (yoy) memberi sinyal kepada pemerintah akan perlunya melakukan kebijakan ekspansif melalui akselerasi belanja pemerintah sebagai stimulus untuk kembali menaikkan laju pertumbuhan ekonomi Sulbar.

BAB V BERITA/ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH

Dana Desa: Potensi dan Tantangan untuk Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah Tertinggal di Provinsi Sulawesi Barat

Kemampuan pemerintah daerah dalam menentukan prioritas kebijakan pembangunan menjadi hal yang penting untuk dicermati di tengah keterbatasan anggaran daerah, tidak terkecuali di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Penentuan prioritas dan arah kebijakan pembangunan tersebut dapat diwujudkan antara lain dengan menentukan prioritas kebijakan pembangunan berdasarkan posisi dan struktur perekonomian di masing-masing kabupaten terhadap perekonomian Provinsi Sulawesi Barat secara keseluruhan sebagai daerah acuan. Salah satu alat analisis ekonomi regional yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi struktur pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah Matrik Tipologi Klassen.

Metode analisis tersebut membagi daerah ke dalam beberapa kelompok (*cluster*) berdasarkan dua indikator utama yaitu pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita daerah. Selanjutnya, *clustering* daerah menggunakan Tipologi Klassen dikembangkan dengan mengadopsi angka IPM sebagai indikator pengukuran struktur makroekonomi suatu daerah mengingat indikator kemakmuran suatu daerah tidak hanya diukur dengan Pendapatan per Kapita semata namun juga taraf pendidikan dan tingkat kesehatan masyarakatnya. (Sjafrizal, 2014)

Tabel 5.1 Rata-Rata Laju PDRB, Pendapatan per Kapita, dan IPM
Lingkup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013-2017*

Kabupaten	Rata-rata Laju PDRB 2013-2017 (%)	Rata-rata Pendapatan per Kapita 2013-2017 (Juta Rp.)	Rata-rata IPM 2013-2017
1. Majene	5,66	17,29	64,32
2. Polewali Mandar	7,29	17,26	60,79
3. Mamasa	5,88	11,63	63,21
4. Mamuju	8,20	24,44	65,09
5. Mamuju Utara	9,32	37,45	64,70
6. Mamuju Tengah	5,78	14,86	62,23
Sulawesi Barat	7,02	20,49	63,39

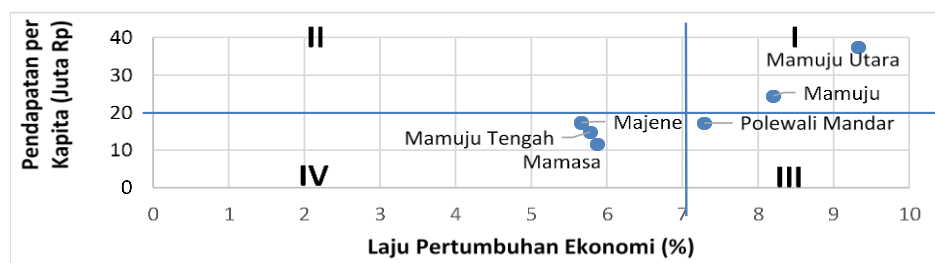
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat (diolah)

Keterangan: *Data 2017 merupakan proyeksi berdasarkan tren dalam kurun 6 tahun terakhir.

Berdasarkan hasil analisis Tipologi Klassen menggunakan data makroekonomi sebagaimana ditampilkan pada Tabel V.1, daerah-daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Barat dapat dikelompokkan dalam empat *cluster*, yaitu: **Daerah Maju** (*High Growth and High Income*) pada Kuadran I, **Daerah Maju tapi Tertekan** (*High Income but Low*

Growth) pada Kuadran II, **Daerah Berkembang** (*High Growth but Low Income*) pada Kuadran III, dan **Daerah Relatif Tertinggal** (*Low Growth and Low Income*) pada Kuadran IV.

Grafik 5-1 *Clustering Wilayah Sulawesi Barat Menurut Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan per Kapita Berdasarkan Tipologi Klassen*



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat (diolah)

Pada *scatter plot* di atas, nampak bahwa dari enam kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, hanya Kabupaten Mamuju Utara dan Kabupaten Mamuju yang dapat dikategorikan sebagai Daerah Maju (Kuadran I). Hasil yang sedikit berbeda nampak pada analisis yang menggunakan angka IPM sebagai substitusi atas indikator Pendapatan per Kapita. Nampak bahwa Kabupaten Majene berada pada kelompok Daerah Maju tapi Tertekan setelah pada hasil analisis sebelumnya masuk dalam Daerah Relatif Tertinggal. Hal ini berhubungan dengan keunggulan angka IPM Kabupaten Majene khususnya di sektor pendidikan.

Grafik 5-2 *Clustering Wilayah Sulawesi Barat Menurut Laju Pertumbuhan Ekonomi dan IPM Berdasarkan Tipologi Klassen*

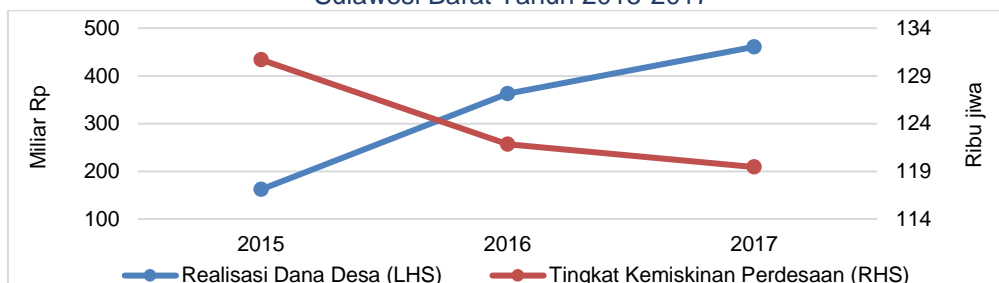


Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat (diolah)

Sementara itu, untuk bergerak dari *cluster* Daerah Berkembang menuju *cluster* Daerah Maju dan agar terhindar dari potensi masuk ke dalam kategori Daerah Relatif Tertinggal, Kabupaten Polewali Mandar masih perlu meningkatkan nilai PDRB untuk mendorong Pendapatan per Kapita masyarakatnya. Hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar mengingat fakta bahwa populasi penduduknya terbesar di Provinsi Sulawesi Barat. Kabupaten Polewali Mandar dapat memanfaatkan potensi berupa laju pertumbuhan ekonomi yang telah melampaui rata-rata provinsi. Selanjutnya, berdasarkan dua hasil analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Mamasa dan Mamuju Tengah menjadi daerah yang secara konstan masuk ke dalam *cluster* Daerah Relatif Tertinggal.

Pemerintah daerah lingkup Sulawesi Barat perlu bersinergi untuk memperbaiki struktur ekonomi di wilayahnya terutama Kabupaten Mamasa dan Mamuju Tengah yang memiliki indikator makroekonomi di bawah rata-rata wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Salah satu program pemerintah yang potensial untuk mendorong laju indikator makroekonomi regional tersebut adalah Dana Desa. Program tersebut dapat menjadi solusi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa dan mendorong laju PDRB pada skala yang lebih luas yaitu tingkat kabupaten dan provinsi. Penyaluran dana desa di Provinsi Sulawesi Barat secara tidak langsung mampu meningkatkan perbaikan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa yang tercermin pada semakin menurunnya tingkat kemiskinan perdesaan sebagaimana tampak pada Grafik 5.3.

Grafik 5-3 Perkembangan Realisasi Dana Desa dan Tingkat Kemiskinan Perdesaan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015-2017



Sumber: Aplikasi SIMTRADA dan BPS Provinsi Sulawesi Barat (diolah)

Sesuai dengan prinsip *money follow function* dan *money follow program*, Dana Desa memberikan sumber pendapatan memadai kepada desa untuk mengelola potensi yang dimiliki guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa. Penyaluran Dana Desa diarahkan pada dua program atau bidang utama yaitu Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dimana pada tahun 2017 terealisasi masing-masing sebesar Rp422,8 miliar (91,7% dari alokasi Dana Desa) dan Rp34,6 miliar (7,5% dari alokasi Dana Desa).

Output dari kegiatan pembangunan desa tersebut antara lain berupa jalan, jembatan, jaringan irigasi, gedung PAUD, bangunan posyandu, dan embung desa. Fasilitas pendukung ekonomi desa juga turut dikembangkan antara lain melalui pengadaan peralatan pendukung pertanian, bibit tanaman pangan, dan pembentukan BUMDes yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat desa. Lebih lanjut, pembangunan fasilitas fisik di desa telah diimbangi pengembangan sumber daya masyarakat desa antara lain melalui kegiatan pelatihan kelompok tani, manajemen BUMDes, pengelola PAUD, kader posyandu, dan aparatur pemerintah desa.

Kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik tersebut apabila terkelola dengan baik berpotensi untuk mengakselerasi laju pertumbuhan ekonomi dan

kesejahteraan masyarakat desa, khususnya di Kabupaten Mamasa dan Mamuju Tengah yang tergolong sebagai Daerah Relatif Tertinggal. Sebagai gambaran, pada tahun 2018 Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Mamuju Tengah mendapatkan alokasi Dana Desa masing-masing sebesar Rp123,8 miliar dan Rp45,02 miliar. Angka tersebut tumbuh masing-masing sebesar 173,8 persen dan 183,1 persen dibandingkan dengan alokasi pada tahun 2015 saat awal digulirkannya program Dana Desa.

Di balik pertumbuhan alokasi anggaran Dana Desa tersebut dan potensi Dana Desa sebagai akselerator pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah tertinggal di Provinsi Sulawesi Barat, terdapat beberapa tantangan yang perlu diantisipasi oleh *stakeholders* terkait. Hal tersebut terinventarisir dari hasil *Focus Group Discussion* (FGD) Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat bersama dengan bagian keuangan pemerintah daerah dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) lingkup Provinsi Sulawesi Barat.

Pertama, penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) masih melebihi batasan waktu paling lama 7 hari kerja setelah diterima di RKUD sebagaimana ketentuan dalam PMK Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Pada Tabel 5.2, nampak bahwa Kabupaten Mamuju belum menyalurkan Dana Desa Tahap I Tahun 2018 ke RKD. Sementara itu, meskipun dana Desa Tahap I dan Tahap II Tahun 2018 telah tersalur seluruhnya ke RKUD Kabupaten Mamuju Utara, penyaluran Dana Desa Tahap I dari RKUD ke RKD tercepat membutuhkan waktu 22 hari kerja. Hal tersebut mengindikasikan adanya kendala penyaluran Dana Desa meskipun syarat pencairan Dana Desa Tahap I tahun 2018 dari RKUD ke RKD yang hanya mensyaratkan Perdes APBDes.

Tabel 5.2 Rekapitulasi Waktu Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD Lingkup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2018*

No	Kabupaten	Tahap I 2017		Tahap II 2017		Tahap I 2018	
		Penyaluran Tercepat (hari kerja)	Penyaluran Terlama (hari kerja)	Penyaluran Tercepat (hari kerja)	Penyaluran Terlama (hari kerja)	Penyaluran Tercepat (hari kerja)	Penyaluran Terlama (hari kerja)
1	Majene	2	7	2	13	5	27
2	Mamuju	11	57	3	23	0	0
3	Mamuju Utara	14	59	2	26	22	41
4	Polewali Mandar	9	48	4	19	6	34
5	Mamasa	7	46	3	33	16	31
6	Mamuju Tengah	8	53	4	33	16	39

Sumber: Aplikasi OMSPAN (diolah)

Keterangan: *Data Tahap I Tahun 2018 belum final mengingat Dana Desa Tahap I Tahun 2018 dari RKUD ke RKD belum tersalurkan 100%.

Berdasarkan hasil FGD, sebagian besar pemerintah desa membutuhkan waktu untuk merevisi APBDes Tahun 2018 yang telah ditetapkan sebelumnya guna mengakomodir program Padat Karya Tunai (PKT). Hal tersebut turut menyebabkan keterlambatan penyaluran Dana Desa Tahap I dari RKUD ke RKD yang seyogyanya dapat dicairkan pada bulan Januari dan Februari 2018. Selain itu, keterbatasan SDM aparatur desa menjadi hal selanjutnya yang perlu diperhatikan. Sebagai contoh, aparatur Desa di Kabupaten Mamuju mengalami kendala dalam menyusun RAB proyek desa yang membutuhkan keahlian teknik sebagai syarat lampiran APBDes. Lebih lanjut, pergantian paratur desa turut berkontribusi terhadap kesinambungan penyaluran Dana Desa baik dari sisi pencairan maupun pertanggungjawaban dan pelaporan.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh *stakeholders* terkait. Pemerintah pusat memberikan batasan agar setiap desa hanya melaksanakan hingga lima proyek pembangunan agar skema PKT berdampak signifikan (Hayyu, 2018). Di lain pihak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Sulawesi Barat telah mengadakan Bimtek Penatausahaan Keuangan Daerah yang diikuti oleh perwakilan bendahara desa lingkup provinsi Sulawesi Barat untuk meningkatkan kemampuan bendahara dalam menatausahakan keuangan desa (RADAR SULBAR, 2018). Lebih lanjut, terdapat upaya dari Kemendes yang melibatkan Pemda, Polri, TNI, Kejaksaan, dan masyarakat untuk mengoptimalkan pengawasan Dana Desa lintas sektor (Jafar, 2018). Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat menjadi solusi atas kendala pelaksanaan program Dana Desa. Dengan demikian, Dana Desa dapat menjadi sumber daya potensial pendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di daerah relatif tertinggal di Provinsi Sulawesi Barat.

REFERENSI

Hayyu, Pradany. 2018. Selamat Tinggal Desa Tertinggal. *Media Keuangan*, Vol. XIII (125): 16-17

RADAR SULBAR. 13 Maret, 2018. *DPMD Latih Bendahara Desa*. Hal 9.

Jafar, Imran. 28 Februari, 2018. *Pengawas Dana Desa Lintas Sektor*. RADAR SULBAR. Hal 7.

Sjafrizal. 2014. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: Rajawali Pers



KEMENTERIAN KEUANGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT

“Mengawal APBN, Membangun Negeri”